

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 merupakan salah satu tahapan yang mendapat perhatian khusus dari jajaran Badan pengawas pemilihan umum mulai dari pengawas tingkat pusat sampai jajaran pengawas ditingkat desa/kelurahan/gampong, hal ini mengingat pada setiap pelaksanaan Pemilu pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dan daftar pemilih selalu memunculkan persoalan dan permasalahan dan memiliki potensi kerawanan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 dan juga untuk mengetahui kendala dan hambatan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dalam mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dan jajaran terhadap pemutakhiran data pemilih terhadap hasil coklit yang ditetapkan sebagai data daftar pemilih sementara (DPS) masih mengalami beberapa kali saran perbaikan. Terhadap data pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemilih memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), Panwaslih Kabupaten Bireuen merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk ditindaklanjuti dengan melakukan validasi ulang dan Mengeluarkan data pemilih tidak memnuhi syarat (TMS) dari DPSHP dan DPSHP Akhir. Kendala yang berasal dari internal organisasi yang ditemukan yaitu ketidakseimbangan sumber daya manusia Panwaslih dengan penyelenggara pemilu menjadi faktor tidak maksimalnya pemilu, Beban kerja yang ditanggung oleh pihak pengawas sama dengan pihak pelaksana bisa membuat lambat dan lemahnya pengawasan. Hambatan eksternal Panwaslih dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berasal dari Data daftar pemilih yang sulit didapatkan, tidak lengkapnya elemen data pemilih dan tidak tersedianya dokumen kependudukan. Perlu dilakukannya strategi pengawasan yang efektif dalam menjaga hak pilih masyarakat. Pihak pengawas dan pihak pelaksana tetap sama-sama memastikan bahwa semua masyarakat yang memiliki hak pilih itu terdata. Perlu dilakukannya strategi pengawasan yang efektif dalam menjaga hak pilih masyarakat untuk menghindari kendala-kendala yang ada dilapangan.

**Kata Kunci : Pengawasan, Panwaslih, Pemutakhiran Data Pemilih, Bireuen, Pemilu.**

## **ABSTRACT**

*The implementation of the data updating stage and the preparation of the voter list in the 2024 general election is one of the stages that has received special attention from the ranks of the General Election Supervisory Board starting from the central level supervisor to the ranks of supervisors at the village / kelurahan / village level, this is because in every election the implementation of the data updating stage and the preparation of voter lists and voter lists always raises issues and problems and has high potential vulnerability. This study aims to determine the supervision carried out by the Bireuen Election Supervisory Committee (Panwaslih) in updating voter data in the 2024 elections and also to find out the obstacles and obstacles of the Bireuen Election Supervisory Committee (Panwaslih) in supervising the stages of updating voter data in the 2024 elections. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques with interviews and documentation. Data analysis techniques with data reduction stages, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that based on the results of supervision carried out by Panwaslih Bireuen Regency and its ranks on updating voter data on the results of the coklit which are determined as temporary voter list data (DPS), there are still several suggestions for improvement. Regarding the data of voters who do not meet the requirements and voters who meet the requirements but have not been registered in the provisional voter list of improved results (DPSHP), Panwaslih Bireuen Regency recommends that KIP Bireuen Regency be followed up by revalidating and removing the data of voters who do not meet the requirements (TMS) from the DPSHP and Final DPSHP. The obstacles originating from the internal organization found are the imbalance of Panwaslih's human resources with election organizers which is a factor in not maximizing the election, the workload borne by the supervisor is the same as the implementer which can make the supervision slow and weak. Panwaslih's external obstacles in the implementation of voter data updating supervision come from difficult to obtain voter list data, incomplete voter data elements and unavailability of population documents. It is necessary to carry out an effective supervision strategy in protecting people's voting rights. Supervisors and implementers must ensure that all people who have the right to vote are recorded. It is necessary to carry out an effective supervision strategy in protecting people's voting rights to avoid obstacles in the field.*

**Keywords:** Supervision, Panwaslih, Voter Data Updating, Bireuen, Election.